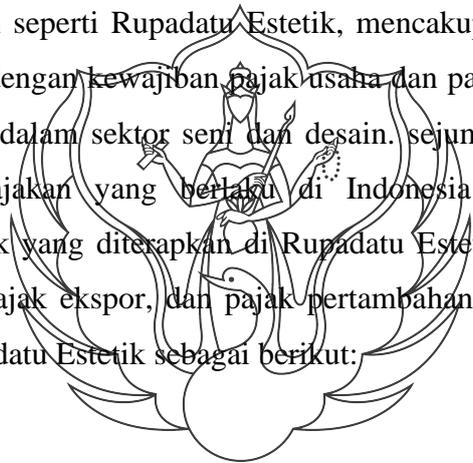


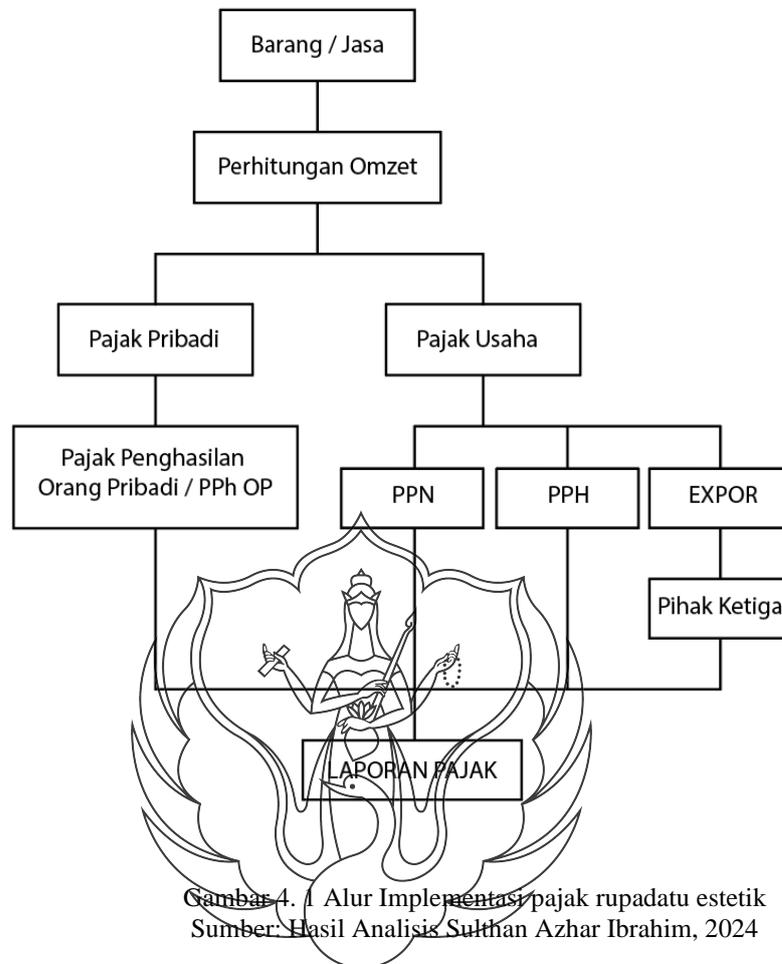
## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Implementasi sistem pajak dalam industri desain interior dan furnitur, khususnya pada perusahaan seperti Rupadatu Estetik, mencakup sejumlah aspek penting yang berkaitan dengan kewajiban pajak usaha dan pajak pribadi. Berdasarkan wawancara dengan Drs. Agus Sriyono S.Sn., pemilik Rupadatu Estetik, perusahaan ini menghadapi berbagai kewajiban pajak, seperti pajak usaha, pajak pribadi, pajak ekspor, dan pajak pertambahan nilai (PPN). Implementasi sistem pajak dalam industri desain interior dan furnitur, khususnya pada perusahaan seperti Rupadatu Estetik, mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kewajiban pajak usaha dan pajak pribadi yang dihadapi oleh pengusaha dalam sektor seni dan desain. sejumlah isu terkait pajak dan kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat dianalisis secara mendalam. Pajak yang diterapkan di Rupadatu Estetik meliputi: pajak usaha, pajak pribadi, pajak ekspor, dan pajak pertambahan nilai. Alur Implementasi pajak oleh Rupadatu Estetik sebagai berikut:



:



Gambar 4. 1 Alur Implementasi pajak rupadatu estetik  
Sumber: Hasil Analisis Sulthan Azhar Ibrahim, 2024

Barang atau jasa yang diterima oleh Rupadatu Estetik akan dihitung omzetnya dan dikenakan pajak sesuai dengan penerimaannya. Jika barang atau jasa masuk ke pribadi, maka pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sementara itu, jika barang atau jasa masuk ke perusahaan, dua jenis pajak yang berlaku adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. PPN dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Kena Pajak, yang mengharuskan perusahaan untuk memungut dan menyeteror pajak atas setiap transaksi barang dan jasa. PPh Badan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengenakan pajak atas penghasilan

yang diterima perusahaan. Untuk PPh, beberapa pasal yang relevan adalah Pasal 21 (pajak atas penghasilan karyawan), Pasal 22 (pajak atas penghasilan dari sumber tertentu), Pasal 23 (pajak atas pembayaran jasa), dan Pasal 29 (penghitungan dan pembayaran pajak terutang). Selain itu, ekspor yang dilakukan oleh pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Rupadatu Estetik juga akan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Semua transaksi terkait barang dan jasa ini akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa meskipun Rupadatu Estetik telah berusaha memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi sistem pajak yang dihadapi oleh perusahaan. Secara umum, tantangan-tantangan ini berkaitan dengan pajak ekspor, serta administrasi pajak yang terdapat tidak terstruktur dengan baik. Setiap tantangan yang ditemukan dapat mempengaruhi kelancaran operasional dan keberlanjutan perusahaan, baik dalam mengelola pajak yang berkaitan dengan produksi furnitur dan desain interior, maupun pajak pribadi yang terkait dengan aktivitas di luar perusahaan.

Rupadatu Estetik memiliki klien internasional, pajak ekspor menjadi aspek yang cukup kompleks. Proses administrasi yang rumit dan sering berubahnya regulasi pajak ekspor membuat perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak ekspor secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan mungkin melibatkan pihak ketiga untuk memastikan kepatuhan.

Rupadatu Estetik telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan kewajiban pajak, di antaranya:

1. Pemecahan Pekerjaan: Membagi proses produksi menjadi unit kecil untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi.
2. Pembatasan Karyawan: Mengurangi jumlah karyawan untuk menekan biaya pajak atas gaji dan tunjangan, sekaligus menjaga efisiensi.

3. *Outsourcing*: Mengalihdayakan pekerjaan untuk mengurangi pajak terkait tenaga kerja dan memberikan fleksibilitas operasional.
4. *Undername Bendera*: Menggunakan identitas perusahaan lain untuk memanfaatkan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Rupadatu Estetik mengadopsi strategi pengelolaan kewajiban pajak dengan tetap mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku. Strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan kewajiban pajak dilakukan sesuai dengan regulasi yang mengatur perpajakan. Langkah-langkah ini bertujuan meminimalkan dampak pajak tanpa melanggar hukum, sehingga perusahaan dapat menjaga kelangsungan operasionalnya sambil mematuhi peraturan perpajakan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Rupadatu Estetik**

Rupadatu Estetik perlu mengimplementasikan beberapa langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan pajak, di antaranya:

- **Penilaian Karya Seni**: Melakukan kerjasama kepada lembaga atau profesional independen untuk melakukan penilaian objektif terhadap karya seni dan furnitur. Selain itu, perusahaan dapat mengajukan standar penilaian kepada otoritas pajak untuk memperoleh pedoman yang lebih jelas dan konsisten.
- **Pajak Ekspor**: Menggunakan jasa konsultan pajak atau pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam administrasi pajak ekspor, sehingga proses ekspor dan pajak terkait dapat dilakukan secara lebih efisien dan sesuai dengan regulasi.
- **Sosialisasi dan Pemahaman Pajak**: Mengadakan workshop atau seminar edukasi untuk pengusaha dan seniman terkait kewajiban pajak yang harus dipenuhi, guna memperluas pemahaman dan penerapan pajak yang lebih baik di industri seni dan desain.

- Administrasi Pajak: Mengimplementasikan sistem perangkat lunak akuntansi yang lebih terstruktur untuk mempermudah pengelolaan pajak dan memastikan akurasi dalam pelaporan pajak.
- Pajak Pribadi dan Usaha: Meningkatkan integrasi pelaporan pajak pribadi dan usaha dengan menggunakan sistem yang lebih efisien untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran.

## 2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk menggali lebih dalam mengenai praktik perpajakan dalam sektor industri kreatif, khususnya dalam usaha kecil dan menengah di bidang desain interior dan furnitur. Disarankan ada penelitian lebih lanjut mengenai kewajiban perpajakan dan pengelolaan pajak pada sektor ini sehingga dapat memperkaya literatur yang ada dan memberikan wawasan lebih mendalam terkait tantangan perpajakan dalam industri seni.

## 3. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Pemerintah, terutama Dinas Perpajakan, diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai peraturan pajak yang berlaku di sektor industri kreatif, serta menetapkan pedoman yang lebih jelas mengenai penilaian karya seni untuk tujuan perpajakan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan pelatihan perpajakan bagi pengusaha seni untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efisien.

## 4. Bagi Masyarakat dan Pengusaha Seni

Bagi pengusaha seni dan desain, sangat penting untuk mempersiapkan dokumen administrasi dengan lengkap dan terstruktur saat mengajukan permohonan hibah atau program bantuan sejenis. Selain itu, pengusaha diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi mengenai perpajakan dan mengikuti pelatihan yang dapat memperluas wawasan mengenai kewajiban perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., GC, B., & Ustiawaty, J. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Anandasivam, U., & Choy, S. (2008). Designing a creative learning environment: NTU's new Art, Design and Media Library.
- Athena, et al. (2022). Eksplorasi Gaya De Stijl Pada Living Room Furniture. *Jurnal Dimensi Seni Rupa Dan Desain*.
- Andiga Kusuma Nur Ichšana,\* , & Vidita Vergia Verena (2020). Mampukah Industri Kreatif Mengatasi Kejenuhan Pertumbuhan Ekonomi Nasional?
- Babbie, E. (2016). *The Practice of Social Research* (14th ed.). Cengage Learning.
- Ching, F. D. K. (2018). *Interior Design Illustrated* (6th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Clodagh. (2014). *Clodagh: Design With a Conscience*. Rizzoli.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- De Jong, A. C. D. L. H. (2020). *The History of Furniture: A Global View*. New York: Thames & Hudson.
- Devina, U., & Utomo, S. (2018). KREASI, Perancangan Furniture Kamar Tidur Untuk Produksi Massal Dan Stan Pameran.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.04/2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pengenaan Bea Masuk.
- Grabiec, P., et al. (2022). Material, Functional, and Aesthetic Solutions for Urban Furniture in Public Spaces.
- Hakala, P., et al. (2015). Young Finnish and German consumers' furniture acquisition – wooden, inherited or just low price?. *International Journal of Consumer Studies*.

- Hendrawan, B. (2023). Dampak UU HPP terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perpajakan*.
- Hermawan, D. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai pada Penjualan Karya Seni di Galeri Jakarta. *Skripsi*, Universitas Indonesia.
- Ilyas, H., & Burton, A. (2020). Pajak di Sektor Ekonomi Kreatif: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Ismanto, A. (2023). Desain Furnitur Kabinet Multifungsi Pada Interior Yayasan Rumah Pagi Bahagia di Bintaro. *JSA*.
- Isnanta, S. D. (2020). *Metode Penciptaan Seni (Sistematika Penulisan Ilmiah)*. Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Jönsson, C., et al. (2014). Furniture in Swedish Nursing Homes: A Design Perspective on Perceived Meanings within the Physical Environment. *Journal of Interior Design*.
- Johnson, P. A. M. K. R. (2022). *The Aesthetics of Furniture: A Study in Design*. Chicago: University of Chicago.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Royalti.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang Penunjukan Pemungut PPN dan PPnBM.
- Mankiw, N. G. (2016). *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- McGowan, L. J. S. D. (2011). *The Fundamentals of Interior Design*. London: AVA Publishing.
- Miharjo, G. (2020). Penerapan Metode Laba Kotor Untuk Menyusun Laporan Kinerja Pada Pedagang Mikro Di Kecamatan Menteng. *Doctoral dissertation*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

- Mohklas, M., et al. (2022). Sosialisasi dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *Jurnal Abdimas Indonesia*.
- Muttaqien, M., & Adiluhung, D. (2021). Usaha Kecil Menengah di Bandung Mendukung Sustainable Design Melalui Pembuatan Furnitur Berbahan Limbah Kayu Menggunakan Konsep Nirmana Dwimatra. *Gorga Jurnal Seni Rupa*.
- Natawijaya, D. (2017). Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Industri Kreatif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kreatif*.
- Neuman, D. J. (1993). *The Interior Design Handbook*. New York: HarperCollins.
- Panjaitan, D., & Siburian, S. (2019). Misi Kristologi dalam Konteks Kebudayaan. *Logia*.
- Pile, J. F. (2005). *A History of Interior Design* (3rd ed.). New York: Wiley.
- Purwono. (2009). *Dasar-dasar Dokumentasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Putra, R. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*.
- Ramadhan, A. (2023). Warisan Budaya dalam Konteks Standar Internasional: Penjagaan Warisan Budaya Untuk Pembangunan Berkelanjutan.
- Rohman, A. T., & Romli, M. A. (2023). *Perencanaan Desain Interior: Aspek Fisik dan Psikologis*. Yogyakarta: Penerbit Arsitektur.
- Saefullah. (2023). Model Pelestarian Warisan Budaya, Konservasi Lingkungan, Dan Pemajuan Kebudayaan: Studi Atas Situs Taman Purbakala Cipari Kuningan.
- Setiawan. (2021). Peran Indonesia dalam Pasar Global Furnitur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Siegel, A. F. (2016). *Practical Business Statistics* (7th ed.). Academic Press.
- Smith, J. R. M. H. (2019). *Cultural Significance of Furniture in Modern Society*. Boston: MIT Press.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sudarsono, B. (2017). Memahami Dokumentasi. *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*, 3(1), 47-65.
- Suhendar, A. (2020). Kajian Pajak Penghasilan pada Penghasilan Seniman di Indonesia. *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada.
- Supramono. (2010). *Pajak dan Peraturan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta.
- Suryanto. (2015). *Pengaruh Pencahayaan Terhadap Suasana Ruang*. Bandung: Penerbit Ilmu.
- Tan, S. M. K. T. H. (2021). *Designing Furniture for the Future*. Singapore: Springer.
- Triola, M. F. (2018). *Elementary Statistics* (13th ed.). Pearson Education.
- Van der Linde, R. D. H. M. (2018). *Furniture Design: An Introduction*. London: Routledge.
- Wiyono, A., Sari, D., & Prabowo, H. (2021). Strategi Pemasaran Furnitur Indonesia di Pasar Internasional. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran*.
- Wimmer, D., Roger, R., & Joseph, R. D. (n.d.). *Mass Media Research: An Introduction* (9th ed.). Wadsworth.
- Zong, H., et al. (2023). Exploring the mechanism of consumer purchase intention in a traditional culture based on the theory of planned behavior. *Frontiers in Psychology*.

**Sumber Daring:**

<https://www.bekraf.go.id>

<https://www.pajak.go.id>

<https://jdih.kemenkeu.go.id>

<https://www.pajak.go.id>

Tinjauan Implementasi Pajak terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Link PDF:*

<https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/232/172>

Implementasi Kebijakan Pajak Progresif bagi Kendaraan Bermotor. *Link PDF:*

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/2522/2024>

Tantangan Hukum dalam Perpajakan Penghasilan Digital di Industri Kreatif.

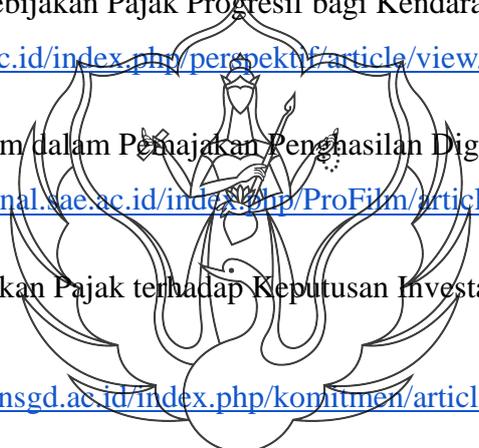
*Link:* <https://journal.sae.ac.id/index.php/ProFilm/article/view/54>

Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Keputusan Investasi di Sektor Industri Kreatif. *Link:*

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/komitmen/article/view/39512>

Manajemen Perpajakan: Strategi dan Implementasi. *Link:*

<https://repository.penerbiteureka.com/pt/publications/565177/manajemen-perpajakan-strategi-dan-implementasi>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Lembar Konsultasi Tugas Akhir dengan Dosen Pembimbing I



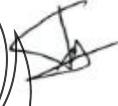
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN RISET DAN  
TEKNOLOGI  
INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA  
FAKULTAS SENI RUPA

TA.02

#### LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR UNTUK KARYA TULIS DAN KARYA SENI /DESAIN

Nama : Sulthan Azhar Ibrahim  
NIM : 18100155026  
Jurusan/Program Studi : Tata Kelola Seni  
Pembimbing II : Trisna Pradita Putra, S.Sos., M.M.  
Semester : Genap  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Pajak dalam Manajemen Produksi Pajak Seni Rupa Pada Desain Interior Dan Furniture Studi Kasus : RUPADATU Estetik

Tanggal	Koreksi/Saran/Perubahan	Tanda Tangan Pembimbing
20/9/2024	konsultasi judul dan penulisan	
27/9/2024	konsul bab 1 konsul Latar belakang	
3/10/2024	Konsul Bab II penyelesaian bab 1	

17/10/24	Konsultasi Bab III Lanjutan Bab II	
24/10/24	Revisi Bab II - Tinjauan pustaka - Landasan teori - Revisi kutipan	
04/11/24	Konsul Bab III - Penjabaran templat - visi misi - list Penjurusan	
15/11/24	Penyelesaian Bab II & III	
22/11/24	Pengumpulan Bab I, III & IV - Penyajian kata - Gambar & foto	
27/11/24	Konsultasi Bab IV - Revisi format - Saran untuk Stage 2ju	
2/12/24	Pengumpulan Bab IV	

9/12/24	Pengumpulan Bab I hingga IV - format tulisan - penggunaan nama	
14/12/24	Finishing & ACC	

## Lampiran 2 Lembar Konsultasi Tugas Akhir dengan Dosen Pembimbing II



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN RISET DAN  
TEKNOLOGI  
INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA  
FAKULTAS SENI RUPA

TA.02

### LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR UNTUK KARYA TULIS DAN KARYA SENI /DESAIN

Nama : Sulthan Azhar Ibrahim  
NIM : 18100155026  
Jurusan/Program Studi : Tata Kelola Seni  
Pembimbing II : Andreas Sudjud Dartanto, S.Sn.,M.Hum.  
Semester : Genap  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Pajak dalam Manajemen Produksi Pajak Seni Rupa  
Pada Desain Interior Dan Furniture, Studi Kasus : Rupadatu  
Estetik

Tanggal	Koreksi/Saran/Perubahan	Tanda Tangan Pembimbing
17/10/24	Konsultasi Judul	
21/10/24	Penetapan tempat penelitian: Rupa datu estetik	
5/11/24	Judul menjadi: Implementasi pajak dalam manajemen Produksi pajak seni rupa pada Desain Interior dan Furniture Studi Kasus : Rupa datu.	

6/11/24	Konsul Bab I - Pendahuluan - Rumusan masalah dibedakan - Analisis Deskriptif	
11/11/24	Penyelesaian Bab I - Sistematika tulisan - alat bantu penyelesaian Konsul bab II - paragraf di parafese - konsep teori	
18/11/24	Penyelesaian Bab II - Landasan teori + contoh ilustrasi Konsul Bab III - <del>bagaimana</del> pustaka apa saja? - Kena pajak apa saja?	
20/11/24	Penyelesaian Bab III - gunakan nama lengkap - konsistensi penulisan	
27/11/24	Konsul bab IV - Pengkuran - membuat grafik	
13/12/24	Penyelesaian Bab IV	
14/12/24	Rangkuman bab I - IV	

17/11/24	Finishing	
19/12/24	ACC	

### Lampiran 3 Transkrip Wawancara

#### a. Narasumber

Nama : Drs . Agus sriyono

Jabatan : Direktur

Waktu : 19 November 2024

Tempat : Pengarten Coffee

Sulthan	Bapak bisa jelaskan Rupa Datu apa sih pak, kalau orang tanya Rupa Datu tuh apa?
Pak Agus	Jadi Rupa datu tuh Intinya ya unit kerja. Unit kerja yang didirikan tahun 2000, di tahun 2000 itu kita persis mulai bikin perusahaan sendiri. Sebelum kita hanya kerja bersama orang lain. Kemudian mengerjakan produk-produk dari orang lain juga. Nah kemudian di tahun 2000 itu memang sudah saatnya untuk membuat suatu unit kerja yang unit kerjanya itu sebenarnya memang sudah berbadan hukum tetapi bentuknya bukan PT bukan CV. Jadi kalau dulu itu namanya kayak semacam UD. Kalau sekarang itu nggak ada tetapi ada yang namanya surat induk berusaha, sampai di situ. Jadi kenapa tidak saya kembangkan menjadi CV atau PT? sebenarnya kalau untuk CV atau PT itu tergantung kasusnya, kalau kasusnya saya harus berproses gitu ya akan saya lakukan. Tetapi kan selama ini tidak karena untuk ekspor pun dengan menggunakan NIB pun sudah bisa jadi tidak perlu ke sana.
Sulthan	Berarti sekarang ini badan hukumnya masuknya apa pak?
Pak Agus	Masuknya usaha jadi kayak semacam kalau saya katakana UD itu dulu kan prosesnya sama dengan CV tetapi pemiliknya adalah personal. Jadi juga tidak berbentuk CV itu enggak karena saat itu sampai sekarang itu tidak ke sana tidak mengharuskan sampai sana tapi kalau diharuskan yang memang harus dibuat. Kita tidak bisa terus tak berizin itu enggak bisa

Sulthan	Jadi hitungannya sampai sekarang secara legal masih muda ya?
Pak Agus	Masih muda, padahal sudah jadul banget
Sulthan	Terus di Rupa Datu ada siapa saja ya Pak? Mungkin kayak strukturalnya
Pak Agus	<p>Strukturalnya sebenarnya kepala produksi ada Pak Subar. Ketuannya juga saya, direktornya saya, direktur utamanya saya. Di bawah saya ada anak saya Sinta untuk operasional. Jadi dia operasional sekaligus sekretaris dan sekaligus juga dia bendahara.</p> <p>Jadi golek gampangnya mas. Saya memang tipe yang tidak suka struktural yang terlalu terlalu rumit. Kemudian Banes itu juga biasa bantu tetapi ya sekapasitas proyek yang dia cocok.</p>
Sulthan	Berarti jatuhnya project officer ya pak?
Pak Agus	ya
Sulthan	Ada lagi pak?
Pak Agus	<p>Di bawahnya produksi ada 3 yaitu dia produksi khusus kayu solid. Jadi bukan kayu lahan yang adanya di Jepara. Di Jepara saya punya 1 unit kerja khusus mengerjakan barang-barang yang terbuat dari kayu solid. Kemudian yang di sini ada Wendy, yang dia komandannya Ganesh. Kemudian yang utama ya itu Pak Subar, dia sebagai seniornya.</p> <p>Kemudian sistem kerjanya juga normal seperti organisasi unit bisnis yang lainnya. Jadi kita yang memprospek pekerjaan, mereka yang mengerjakan. Setelah selesai kemudian ada tim packing dan seterusnya sampai tim loading container ada, tapi tidak masuk dalam struktur supaya kita tidak terikan harus</p> <p>Seperti itu. Karena kan yang namanya container kan tidak setiap hari mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dan seterusnya, tergantung dari iklim bisnis yang ada saya kira begitu.</p>
Sulthan	Kalau untuk visi misinya apa pak? Kira-kira kedepannya Rupa Datu Seperti apa?

Pak Agus	<p>Visi misinya adalah membangun sebuah pekerjaan estetik yang terdapat di semua produk dari Rupa Datu. Jadi sesuai awal kita memulai itu namanya kan Rupa Datu Estetika, jadi sebenarnya dia hanya mengerjakan estetika saja. Tetapi ketika tuntutan lain harus bekerja untuk membuat computer, membuat rumah kayu dan seterusnya itu adalah hal lain tetapi tekanannya tetap ada. Jadi misalnya contoh gampangnya membuat dapur dari mulai konstruksi dapurnya sampai isinya kita buat, tetapi kalau hanya dapur saja yang fungsinya untuk dapur konvensional itu kita tidak. Jadi dapur-dapur yang kecenderungan yang memerlukan estetik, atau rumah pun juga kaya gitu, rumah yang kepentingannya adalah unsur estetikanya ya kita buat. Cuma dalam hal rumah biasa tidak begitu, bukan tidak mau, tapi tidak begitu. Bukan passion-nya.</p>
Sulthan	<p>Nah untuk pekerjaan itu pak, mungkin kita masuk ke ranah ini dulu pak grafiknya dulu pak, yang proses pembuatan satu produk atau spesifik satu karya juga itu apa saja yang perlu dilakukan?</p>
Pak Agus	<p>Jadi yang perlu kita siapkan yang pertama adalah konsepnya dulu. Konsep bagaimana klien itu dia minta tolong kita, kita bantu konsep dia apa, kita campuri dengan konsep-konsep yang mungkin dia belum sepenuhnya paham atau belum sepenuhnya sesuai harapan maka kita obrolin dulu kita diskusikan dulu ini konsepnya mau seperti apa. Itu yang pertama, yang kedua setelah konsep tentunya desain, terus sampai ke RAB dan Timeline, timeline dari pelaksanaan. Jadi misalnya saya contohkan satu produk unit ruang dapur ya, atau konsep kitchen set. Kita buat dulu desain ruangnya. Kemudian sirkulasi udara drainage-nya dimana, kemudian plumbingnya seperti apa lecternya seperti apa, baru kita buat desain yang mempertimbangkan itu sehingga orang melihat itu langsung menangkap bahwa “oh kartu ini”. Jadi tidak terpotong-potong. Dalam hal ini tentu kalau rumah baru biasanya ada tim arsitek sendiri. Nah itu kita diskusi walaupun nanti pelaksanaan Itu</p>

	<p>ada lagi ya tidak masalah. Kita diskusi, kita arahkan dan seterusnya. Maka dalam satu konsep ruang Itu menjadi salah satu karya</p> <p>Itu kalau yang yang sifatnya proyek, tapi kalau yang sifatnya barang yang kita siapkan untuk buyer, kita buat sample-sample. Sample-sample misalnya kunci, meja dan seterusnya</p>
Sulthan	Lebih banyak bayar yang model produk atau proyek?
Pak Agus	Kita proyek
Sulthan	Oh proyek
Pak Agus	<p>Tapi buyer asing. Buyer asing itu gak tau ya apakah memang rolnya disitu atau enggak saya gak ngerti yang jelas kita berdiri itu rata-rata yang nempel itu adalah buyer-buyer yang proyek. Bukan buyer-buyer untuk industri, untuk retail itu bukan. Tapi yang proyek Mungkin mereka selain jualan komputer juga mereka jualan rumah juga desain juga rata-rata itu yang berbeda</p>
Sulthan	Asing itu dari luar negeri ya Pak. Dari lokal ada juga pak?
Pak Agus	Ada, arahnya banyak ke proyek
Sulthan	Malah banyak ke proyek daripada produk industri ya Pak?
Pak Agus	Ya produk industri itu kita tetap buat untuk sehari-hari ya supaya tidak lepas. Itu kita buat ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang untuk dijual di local, diekspor juga tapi gak terlalu terlalu terlalu banyak.
Sulthan	Kok malah banyak proyek ya pak, mungkin malah kebalikannya ya pak malah lebih banyak produknya sih ya Pak
Pak Agus	<p>Pernah dalam hitungan tahun itu Ketika tahun 90-an Itu banyak ke produk Karena masa itu adalah masa dolar naik. Kemudian kalau dolar itu naik Rupiah turun Itu minat beli orang asing kan banyak. Jadi yang biasanya dia beli satu karena dolar tinggi dapat dua, itu merangsang untuk beli. Nah itu banyak-banyaknya produk disitu. Kalau proyek berbeda, proyek itu ketika dolar naik dan dolar turun pun tidak begitu pengaruh karena pengembangnya kan di sana.</p>

Sulthan	<p>Mungkin itu untuk yang dari Rupa Datu ya pak. Sekarang kita akan masuk ke ranah pajaknya itu sendiri. Nah bapak itu kira-kira melakukan perpajakan itu seperti apa ya pak?</p>
Pak Agus	<p>Jadi ada dua, yang pertama adalah pajak usaha. Jadi memang wajib Jadi ketika kita bikin Unit usaha itu kan langsung kita bikin NPWP atas nama UD Atau CV Itu normal itu biasa dan itu juga pelaporannya juga normal seperti lazimnya orang pajak. Kemudian pajak itu kan sebenarnya, jadi ini saya mengutip dari petugas pajak ya, “sebenarnya bukan nilai yang disetorkan tetapi berapapun pendapatan yang harus dipajakkan”. Kalau pendapatan yang tinggi ya otomatis pajaknya tinggi kalau rendah atau tidak ada ya tidak bayar pajak. Itu pengertian saya ya.</p> <p>Kemudian ada juga kita pajak pribadi. Jadi pajak NPWP pribadi itu kita lakukan berdasarkan aktivitas saya secara pribadi. Misalnya mengajar, kemudian mengerjakan proyek sebagai praktisi, kadang-kadang kita diminta untuk membuat proyek apa gitu ya. Kemudian membuat kegiatan-kegiatan yang sepatutnya pribadi itu pajaknya masuknya lewat NPWP pribadi</p>
Sulthan	<p>Terus untuk ekspor apa juga terkena pajak lagi?</p>
Pak Agus	<p>Pajak malah berlipat-lipat. Nah itu masalahnya, jadi gini saya kasih contoh satu. saya bekerja tentu berpajak, bisa lewat perusahaan bisa lewat pribadi. Sudah kena pajak dulu. Kemudian barang saya ketika di ekspor juga ada pajak, Itu juga kena. Kemudian yang ketiga misalnya kita beli material yang import kadang-kadang kan tidak meski lokal ya Itu juga kena pajak.</p> <p>Nah Sekarang Itu kalau semua itu kita bayar untungya enggak ada. Misalnya ada juga hanya capek hanya ongkos capek. Tapi kita punya cara misalnya buyer itu atau orang asing itu kalau beli dia membayarnya satu, harus pakai rupiah, saya tidak pakai dolar pakai rupiah. Kemudian transaksinya itu sampai ke warehouse saja, karena</p>

	<p>biar saya tidak terkena pajak penjualan. Jadi ketika orang beli dia transaksinya sampai ke saya menyiapkan produk sampai packing. Bahkan kadang-kadang saya tidak mengantar supaya tidak kena. Mereka bayar sendiri, kontainernya juga mereka bayar sendiri, kemudian dokumen juga dia buat sendiri. Jadi seakan-akan saya dibeli secara lokal. Itu hanya semacam kesepakatan saja. Dibeli secara lokal, kemudian ada perusahaan memilih pembeli, yang dia mengekspor.</p>
Sulthan	<p>Kalau boleh tahu Pak, kena pajang itu berapa persen kalau misalnya langsung?</p>
Pak Agus	<p>Kalau kami kirim, pajaknya benar-benar nggak besar, tapi persyaratannya rumit.</p>
Sulthan	<p>Oh, berarti lebih ke persyaratannya ya bukan ke pajaknya. Itu berlaku untuk dua-duanya pak? Untuk proyek maupun yang barang?</p>
Pak Agus	<p>Iya, begitu. Ya, pandai-pandai kita bertransaksi dengan orang asing atau orang lokal, ketika nanti ini tanggung jawab siapa. Kan kita sama-sama tahu nih, kalau beli di toko, itu kan kena 10 persen itu kan iya. Nah, ini semua yang tidak kena itu, tapi kenanya adalah pribadi atau pacet personal, itu kan bisa diatur misalnya belinya tidak lewat toko, tapi lewat transaksi di warehouse tadi. Pokoknya lebih ringan.</p>
Sulthan	<p>Untuk yang transaksi di warehouse itu berarti nggak ada masalah ya, Pak?</p>
Pak Agus	<p>Nggak ada masalah</p>
Sulthan	<p>Memang legal kan itu?</p>
Pak Agus	<p>Legal. Kena pajak cuma pajak perusahaan saja.</p>
Sulthan	<p>PNPBH itu saja?</p>
Pak Agus	<p>Iya</p>
Sulthan	<p>Nah, ini masuk untuk laporannya, Pak. Misalnya perbulannya itu berarti itu juga menggunakan faktur juga ya, Pak?</p>
Pak Agus	<p>Menggunakan faktor. Bukan perbulan lah, pertahun.</p>

Sulthan	Oh, pertahunnya. Oh, laporan perbulannya berarti enggak ya, Pak?
Pak Agus	Enggak. Laporan pertahun itu ya kita laporan saja. Kalau itu-itu terjadi sebatas waktu, sebatas ambang, kita kena pacet ya diupayakan supaya itu terjadi. Ya, jujur-jujur saja selah-selah itu harus kita manfaatkan.
Sulthan	Jadi memang akhir tahun itu akhirnya pengeluaran dan pemasukan itu ditetapkan nihil ya, Pak?
Pak Agus	Iya. Ya, tidak di-heal banget sih. Tapi artinya... Normal lah. Kalau nihil sekali ya... Enggak mungkin.
Sulthan	Kalau Bapak pernah ketemu masalah pacet nggak selama ini, Pak? Maksudnya di Perusahaan gitu. Atau mereka cuma datang survei abis itu sudah gitu, Pak?
Pak Agus	Iya. Minta dibikin laporan SPT gitu sudah.
Sulthan	Oh, malah jadi SPT ya, Pak?
Pak Agus	Iya. Tidak pernah ada teguran atau apa-apa. Karena antisipasinya sebenarnya gini, mas. Termasuk nilai, ya. Nilai misalnya... Kayak orang jual tanah gitu, ya. Jual tanah itu kan per meternya kalau normal kan tinggi. Kadang-kadang diturunkan per meter. Tapi bayarnya tetap. Supaya kena pajaknya rendah. Itu juga sama. Ada peluang seperti itu... Yang penting kan kita tidak menyalahi aturan.
Sulthan	Berarti sebenarnya Bapak ini juga. Kenaanya, hitungannya banyak PPA 23, ya, Pak? Karena proyeknya jasa, Pak.
Pak Agus	Iya, iya. Jasa. Kalau kita memakai furniture jati gitu ya tinggi. adi, saya ada strategi begini. Supaya kita berdiri, jalan. Kemudian tidak serta-merta tersorot bahwa itu Itu perusahaan besar, atau perusahaan menengah. Kita tidak pernah punya karyawan itu lebih dari 10. Kemudian, kalau menjelang 10 itu biasanya kita support lagi, kita bikin vendor. Vendor pun juga tidak pernah lebih dari 10. Supaya...

	<p>Sebenarnya ini bukan masalah pajak, tapi masalah efektivitas keuangan saja yang nanti biasanya kan impact-nya ke pajak juga.</p> <p>Tapi efektivitas keuangan itu supaya kita itu setiap putaran perbulan tidak terlalu tinggi. Kalau toh terjadi tinggi itu kan ditopang banyak orang. Daripada kita pegang sendiri 50 orang gitu. Itu kan berat. Kita pisah seperti itu. Jadi sistemnya namanya kalau dalam industry furniture itu pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu salah satu strategi untuk satu, mengurangi konsentrasi keuangan. dan kalau di atas 10 kan sudah dikatakan perusahaan sudah sampai di menengah. Kalau di bawah 10 masih kecil.</p>
Sulthan	<p>Tapi kan itu nanti juga akan berefek ketika pendapatannya lebih dari 5, ya. Misalnya sudah ada 5 miliar itu nanti akan mulai menjadi besar karena pendapatnya gede banget.</p>
Pak Agus	<p>Tergantung juga, itu bisa mudah. Kan rota bisa dibikin tidak satu. Jadi bagaimana caranya kita itu tetap bisa hidup tetapi tidak dalam skala yang harus pajak tinggi pertama. Yang paling utama bukan pajaknya. Yang paling utama adalah circle modalnya itu jangan sampai tinggi banget. Nanti Ketika jatuh mereka juga bangkitnya susah. Kita buat supaya orang itu biar orang tidak “tuh kan karyawannya segitu pasti PT”. Kenapa harus seperti itu? Kita nggak ke sana. Lebih ke pemberdayaan.</p>
Sulthan	<p>Di setiap tahun ya, Bapak. Soalnya, kalau saya pribadi, saya bayarnya setiap bulan. Karena saya CV. Mungkin tergantung dari ada perbedaan aturannya. Saya kan tidak, jujur saya ngobrol sama orang pajak itu kadang bingung juga. Karena ada mereka yang ngerti ada yang mereka juga nggak ngerti.</p>
Pak Agus	<p>Ya saya tidak banyak tahu ya tentang pajak. Tapi saya ambil yang patok pajak. Jika saya berpajak datang ke kantor pajak, misalnya. Mau pajak pribadi atau pajak usaha, Pak? Pajak usaha. Udah bisa nggak? Bisa, Pak. Ya sudah. Tapi kalau dibandingkan PT saya</p>

	membuat aktor dulu. Administratifnya yang saya nggak. Kalau dibandingkan keuntungan itu.
Sulthan	Sebenarnya, saran kalau misalnya mau ganti lebih ke CV saja sih pak karena aturannya lebih gampang Pak.
Pak Agus	Lebih gampang. Cuma masalahnya kalau CV ini bangkrut bandarnya ikut bangkrut. Kalau PT tidak. Dan saya nggak pernah tender pemerintahan nggak pernah begitu. Kalau saya harus ikut Berarti kan saya harus buat CV
Sulthan	Saya baru mau tanya bapak, berarti pemerintahan itu pemilihan langsung, ya? Bukan Tender ya?
Pak Agus	Iya. Jadi ada pintu sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau di bawah 200 juta itu kan penunjukan langsung. Nah, kebetulan saja misalnya kita dapat kenal baik dan seterusnya. Ya jangan sampai lebih dari 200 juta. Kita pecah kan bisa. Kita pecah supaya dapetnya 200 dan targetnya juga mudah
Sulthan	Walaupun kepotong 11 persen ya, Pak.
Pak Agus	Tapi kan masih logis. Ya, kayak ini, Mas. Ini tuh awal-awal buka pasar datang. Dia minta klasifikasinya itu masuk ke cafe dan restoran, 15 persen. Dilogika saja modal kita itu berapa? Kemudian kita kontrak berapa? Untungnya ada nggak? Akhirnya nggak diproses. Jadi pajak itu musuhnya logika. Kalau logika kita jalan ya nggak kena kita. Kita bisnis atau bekerja, kita sudah bayar pajak. Hasilnya pekerja kita belikan motor atau mobil bayar pajak. Kemudian mobil juga setiap tahun bayar pajak. Mau dijual kena pajak. Mau direntalkan juga pajak. Usaha kan kalau dihitung berapa belinya sama pajak bisa lebih itu. Saya makelar tanah. Jual tanah kita pakai pajak. Beli juga pakai pajak. Menempati tidak menempati kita bayar PBB. Sekarang tidak salah misalnya, seorang penjual tanah itu dia memanipulasi harga yang per meternya misalnya 7 juta atau 5 juta, kita buat saja per meternya 1

	juta. yang kena pajak, cuma 1 juta itu, dikalikan luasan. Kalau misalnya itu kita terang-terangnya harus bayar pajak utuh ya tinggi banget.
Sulthan	Banyak orang yang bilang begitu juga, Pak. Kecuali, memang partnernya pemerintah. Tapi, kalau misalnya, Bapak itu pernah misalnya ada proyek. terus kayak ngundang orang gitu, kan. Orangnya itu udah punya NPWP. Nanti Bapak bayarin juga nggak pajaknya dia? Atau nanti biar dia yang urus sendiri gitu pak?
Pak Agus	Ya, tergantung. Kan, otomatis kan gini beli atau tidak beli kita kan tetap bayar pajak. berdasarkan pendapatan per bulan sampai per tahun. Mereka juga sama seperti itu. Sekarang tinggal apa yang dijual. Kalau yang dijual itu kayak semacam benda berpajak, kayak mobil, motor itu ya otomatis kan kita bayar juga. Tapi kalau furniture kan tidak
Sulthan	Oh, nggak masuk barang mewah ya?
Pak Agus	Ya, nggak masuk. Sebenarnya bisa masuk ke sana. Tapi kan nggak ada sertifikatnya. Kayak misalnya tanah sangat luas, tapi di tepi sungai. Itu nggak bisa digunakan. Jadi, di pantaran Sungai itu nggak bisa digunakan, meskipun biar tanahnya ada sertifikat. Sertifikatnya tidak laku.
Sulthan	Tapi kalau misalnya furniture yang harganya, misalnya sampai milyaran gitu berarti bisa ya pak?
Pak Agus	Ya masuknya pembelian barang mewah. Tapi kan kriteria pembelian barang mewah itu kan harus disadari bersama antara pembeli dan penjual. Jadi, barang misalnya keris ya. Keris itu dianggapnya barang, ya nggak jadi barang mewah. Padahal keris itu sebelumnya mewah. Saya beli Harley, per tahunnya itu 5 juta, pajak setiap tahun.
Sulthan	Bapak membayar gaji karyawan sesuai dengan aturan pemerintah daerah?
Pak Agus	Kita itu sebenarnya bayar tenaga itu tidak dibawah UMR. Karena kita menghitung markah, menghitung tempat tinggalnya, dan

	<p>selanjutnya. Itu kan, kalau di total, dengan uang lepas yang per bulan 4 juta itu hampir sama. Jadi, parameternya itu tidak sama. Pajak juga, ya. Jadi, parameternya itu kan maksudnya untuk semua orang, tapi sebenarnya banyak orang yang masih dibawah ambang batas pajak. Maka pemerintah kadang-kadang yang tidak masuk ambang batas itu menjadi nihil. Tapi apakah kita pertahun nihil terus, kan tak mungkin.</p>
Sulthan	Untuk Project bapak biasanya seperti apa?
Pak Agus	<p>Itu aku pernah punya proyek di kabupaten Berau. Itu bikin interior tiga lantai full. Kemudian dia tanya ini produknya gimana? Pajaknya gimana? Saya ngomong apa padanya, kita enggak pernah itu. Jadi kalau memang kita harus bikin, itu ambil aja perusahaan sana. Pajaknya dia urus, kemudian sisanya saya kena berapa. Itu yang saya percaya. Mau dia pakai atas nama perusahaan sana, blablabla, pajak dia urus semua, jadinya kalau kena, kita dibawah 200, tapi kali tiga. Ya oke, enggak apa-apa. Jadi kali tiga penawaran gitu. Jadi dibawah 200, kali tiga. Tidak masalah. Yang penting kan kita bisa jalan, mereka juga tidak menyalahi aturan</p> <p>Bank itu Bisa menjamin ketika pekerjaannya itu Arsitek dan struktur Pekerjaan interior gak ada jaminan Bisa dijaminan lepas, gak bisa Interior itu gak bisa dijaminan Arsitek itu bisa. Apalagi kontraktor furniture. Yang bisa dijaminan itu kontraktor arsitek. Struktur apa lagi, sangat bisa. Jadi gimana bank mau menjamin-nya, padahal secara nilai kadang-kadang arsitek itu nilainya sampai satu milyar dalam satu rumah. Interior juga mirip-mirip seperti itu. Struktur juga segitu. Itu kan nggak adil. Secara kesempatan terbang kan kita nggak dibuat adil. Nah alasannya, interior itu lebih banyak barang-barang yang mobile. Barang-barang mobile itu misalnya bisa dipindah di lain tempat, mudah diolah, itu nilai jaminannya lebih kecil. Kan ya rumah pun sebenarnya bisa dibedah.</p>

## Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Gambar 4.1 Wawancara dengan Ganesh  
Sumber: Dokumentasi Sulthan Azhar Ibrahim, 2024



Gambar 4.2 Wawancara dengan Pak Agus  
Sumber: Dokumentasi Sulthan Azhar Ibrahim, 2024



Gambar 4.4 Produksi Di Studio Rupadatu  
Sumber: Dokumentasi Sulthan Azhar Ibrahim, 2024



Gambar 4.5 "Obsesi" Karya dari Agus Sriyono S.Sn  
Sumber: Dokumentasi Rupadatu, 2024



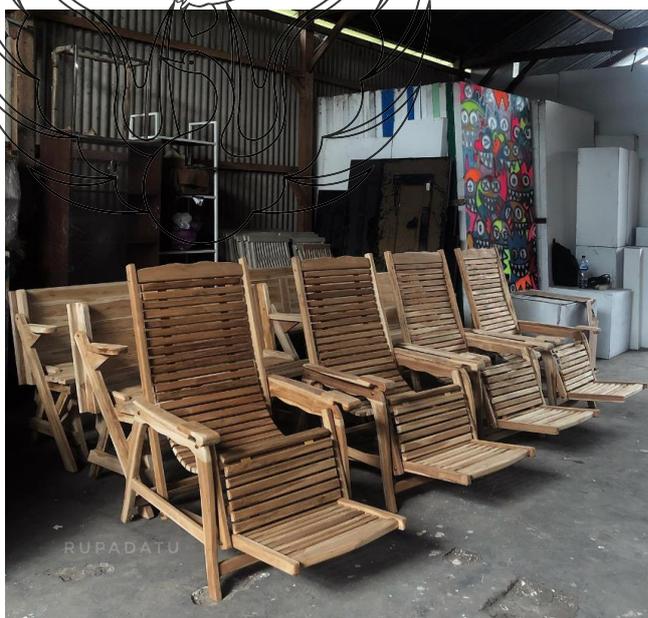
Gambar 4.6 Desain Interior dan Penerapannya oleh Rupadatu  
Sumber: Dokumentasi Rupadatu, 2024



Gambar 4.7 Produk Kursi  
Sumber: Dokumentasi Rupadatu, 2024



Gambar 4.7 Display untuk pameran  
Sumber: Dokumentasi Rupadatu, 2024



Gambar 4.8 Produk Kursi sebelum pengiriman  
Sumber: Dokumentasi Rupadatu, 2024



Gambar 4.7 Persiapan display untuk pameran  
Sumber: Dokumentasi Rupadatu, 2024



## BIODATA MAHASISWA

Nama : Sulthan Azhar Ibrahim

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 2 Desember 1999

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat Lengkap : Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta.

No. Telp : 081903734304

Email : [Sulthan21299@gmail.com](mailto:Sulthan21299@gmail.com)

### Pendidikan

SD Tumbuh

SMP tumbuh

SMK 5 - DKW 2016 - 2017

ISI Yogyakarta - Tata Kelola Seni 2018 - Sekarang

### Job

PT. Aseli Dagadu Djokdja ( Intern ) 2017

CV. Kreasi Luwes Berkah Nuswantoro 2018 - 2022

Blass Group (intern) 2022

CV. Ruang Imajiner 2022 - Sekarang

Tactic Plastic 2023 - 2024

### Skills

- Design
- Video
- Event Management
- Project Officer
- Administration

## Experience

2017

- Panitia Penyelenggara Pameran “ BordirHood ” PensilTerbang
- Panitia Penyelenggara Pekan Seni Grafis Yogyakarta 2017

2018

- Desainer Pameran Seni “ Aruh-Aruh “
- Panitia Penyelenggara “ Content Creator ” 2018
- Inking Komik PSIM 2018
- Coloring Buku Pelajaran SD Pelajaran Bahasa Inggris Muhammadiyah
- Panitia Pameran & Dokumentasi “ Kelola Art Festival #3 “

2019

- Panitia Penyelenggara Pameran Seni Grafis Yogyakarta 2019
- Kantin Kurasi Tour Guide Biennale Jogja 2019
- Panitia Penyelenggara Musik Malam Yogyakarta
- Desainer “ Kelola Art Festival #4 “
- Social Media Management “ Lintring Coffee “
- Panitia Penyelenggara “ Jogja Cross Culture 2019
- Project Manager Happy Rock Year 2019
- Desainer Seminar TKS ISI Yogyakarta “ Dunia Koleksi “

2020

- Koordinator Media “ Kelola Art Festival #5 ”
- Panitia Penyelenggara “ Sarasehan Seni ”
- Panitia Penyelenggara Mural “ Mural Sanitizer ”
- Desainer Pameran Seni Rupa “ Menerjang Batas “
- Project Manager “ Digitalisasi Rintisan Kelurahan Budaya Yogyakarta ”
- Desainer Pameran Seni Rupa “ Tonggak “

- Desain Logo “ Hotel Sumaryo ”
- Layout Design Event “ KustomFest ”
- Penyelenggara Acara BNPT 2020
- Desain Logo “ Dawet Kemayu ”
- Sutradara Video “ Gelaran “
- Sutradara Video “ Lestari “

2021

- Asisten Project Manager ” Kumpul Koperasi “
- Social Media Management “ Lurah Musik “
- Dokumentasi Pameran Seni Rupa “ Jalan Gelap “
- Project Manager Kanal Musik
- Panitia Penyelenggara “ UKM IKM Nusantara ”
- Project Manager Kolaborasi
- Art Director Dan Designer Pameran Kurasi Arsip “ Amukan Gagak “
- Project Manager Sound Of Destination
- Coloring Storyboard Iklan “ Amh jahe merah “
- Sutradara Iklan “ Food Wasted ” Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Yogyakarta
- Panitia Penyelenggara “ Equal Exhibition”

2022

- Coloring Storyboard Iklan Nugget “ Dosuka “
- Coloring Storyboard Iklan Isuzu Traga
- Project Manager Bantul Museum Expo “ Pustaka Raya “
- Belanja penambahan nilai gedung dan benungan berupa interior ruang rapat STMTA 2022 - MMTC
- Pengadaan Sofa - Dinas pekerjaan umum, Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sleman - 2022
- Pengadaan Kursi Direktur - Dinas pekerjaan umum, Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sleman

- Kurator Pameran Break The Stigma “ People are strange, When You’re The Stranger”

2023

- Desainer Pameran “ Kencan Nonton Wayang “ - TBY
- Art Director Pameran AMEX “ Beyond the border : connecting Cultures “ - Museum Sonobudoyo
- Project Manager Karya Kayun Kalamangsa: Ngrumat Arep - TacTic Plastic
- Project Manager Karya Tabur Daur - TacTic Plastic
- Project Manager Karya Land Of Knowhere - TacTic Plastic 2023
- Pengadaan Jasa Kurasi dan Valuasi karya di Bandara Udara Internasional Lombok - ANGKASAPURA - 2023
- Belanja Jasa Konsultasi Perorientasi layanan, Jasa Khusus, Kajian Konservasi Karya Budaya - TBY - 2023
- Pengadaan Barang Kaos Dalam kegiatan Capacity Building - MMTC - 2023
- Pengadaan Barang Tas Selempang Dalam Kegiatan Capacity Building - MMTC - 2023
- Pengadaan Jasa Perbaikan Printer - Indomarco - 2023
- Pengadaan Barang Tas Selempang - MMTC - 2023
- Pengadaan Barang Tissue Jepang 2 Roll - Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Yogyakarta - 2023
- Pengadaan Barang Kaos Polo - MMTC - 2023
- Pengadaan Barang Genset KPJR Tk.1 Bantul - PT. Jasa Raharja - 2023
- Pengadaan Barang Mebelair untuk dukungan layanan pendidikan - MMTC - 2023

2024

- Project Manager Karya Land Of Knowhere II - TacTic Plastic

- Project Manager Karya Tactic Plastic X Nature Republic “ Rawat Jagat “ - TacTic Plastic
- Project Manager Mural Mitodolgi Hanacaraka - DAGADU
- Desainer Katalog Karya Koleksi TBY 2024 - TBY
- Dokumentasi Pameran Seni Rupa Akar Rasa Setara - Jogja Disability Arts
- Kajian Kuratorial Koleksi Pusat Situs Gunung Selendang - Kemendikbud - 2024
- Pengadaan Barang Perbaikan Printer - Indomarco - 2024
- Pengadaan Barang Perbaikan Monitor - Indomarco - 2024
- Pengadaan Barang Perbaikan Alat dan Bahan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 2024
- Pengadaan Celana Dalam Kegiatan Capacity Building - MMTTC - 2024
- Pengadaan Jasa lainnya dalam rangka mendukung kegiatan literasi digital sektor pemerintah kepada WSN kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan teknologi - Direktorat Jendral Aplikasi Informatika
- Pengadaan jasa lainnya dalam rangka pelaksanaan literasi digital sektor pemerintahan kepada prajurit TNI - Direktorat Jendral Pajak - 2024
- Pengadaan Barang Pompa Air - Politeknik Pembangunan Pertanian ( POLBANGTAN ) - 2024
- Belanja Modal Alat- Alat Peternakan Pengadaan peralatan UPT RPH Cilongok